



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA MADIUN
UNIT KERJA : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **HERI WASANA**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **448406**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **527.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m²/120 m² di KAB / KOTA MADIUN, HASIL SENDIRI Rp. 352.000.000
2. Tanah Seluas 190 m² di KAB / KOTA MADIUN, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **268.600.000**

1. MOTOR, SUZUKI TITAN Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 2.800.000
2. LAINNYA, POLYGON SEPEDA Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 700.000
3. LAINNYA, PHOENIX SEPEDA Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 230.000
4. LAINNYA, WIM CYCLE SEPEDA Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 170.000
5. LAINNYA, EXOTIK SEPEDA LIPAT Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 950.000
6. MOBIL, MITSUBISI XPANDER EXIT Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000
7. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 24.000.000
8. MOTOR, YAMAHA BK6 R MT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 19.750.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **40.500.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	86.818.688
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	922.918.688
III. HUTANG	Rp.	31.200.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	891.718.688

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.